



APRIL 10, 2018

**KETERTELUKURAN (TRACEABILITY)
DALAM KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN?**
SEBUAH STUDI PUSTAKA UNTUK PENYUSUNAN POLICY PAPER

AISYAH SILEUW



1 Definisi Traceability

Traceability atau yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'keterlacakan' atau 'ketertelusuran' memiliki banyak interpretasi jika diterapkan dalam produksi minyak sawit berkelanjutan, terutama berkaitan dengan tren yang berkembang belakangan di kalangan pembeli minyak sawit di Eropa dan Amerika Utara. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan penggunaan istilah yang berbeda-beda tersebut untuk dan memberikan pemahaman lebih terhadap traceability dalam berbagai penggunaan istilah.

Secara umum definisi traceability adalah kemampuan untuk melacak sejarah, lokasi atau penggunaan sebuah benda dengan menggunakan cara pencatatan identifikasi yang tersimpan¹. Dalam konteks rantai pasok komoditas, traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan melacak asal, distribusi, lokasi dan penggunaan produk dan material di sepanjang rantai pasok². Sementara kegiatan pencatatan identifikasi yang dilakukan untuk mencapai traceability dinamakan Chain-of-Custody (disingkat CoC) atau rantai hak asuh (atau lebih tepatnya, rantai kepemilikan). CoC bertugas menyambungkan informasi tertentu mengenai sebuah bahan baku (misalnya CPO), produk menengah (misalnya oleochemical) ataupun produk akhir (misalnya biskuit)³.

Di dalam konteks sertifikasi produk berkelanjutan, terdapat standar CoC yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang "mengasuh" produk tersebut di sepanjang rantai pasok dalam hal ini secara legal memiliki produk tersebut melalui jual beli dan secara fisik juga menangani dalam perpindahan atau penanganan produk tersebut⁴. Standar CoC biasanya meliputi soal pencatatan informasi secara terkait produk dan pihak yang melakukan jual beli secara lengkap, termasuk klaim sustainability dari produk tersebut. Misalkan, dalam jual beli, wajib untuk memeriksa validitas sertifikasi yang dimiliki oleh pemasok dan juga memastikan bahwa pemasok menuliskan klaim bahwa produk yang dijual adalah produk yang bersertifikat. Standar CoC biasanya juga mengharuskan bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen yang memastikan bahwa proses pencatatan ini terjadi secara konsisten di sepanjang operasinya. Jika sistem CoC yang baik berjalan di semua perusahaan di sepanjang rantai pasok, maka hasilnya adalah aliran bahan baku secara fisik dapat dilacak baik maju maupun mundur di dalam rantai pasok, dan keterlacakan atau traceability inilah yang diinginkan agar integritas klaim sustainability dalam produk bisa

¹ "Traceability", *En. Wikipedia. Org*, last modified 2018, accessed March 24, 2018, <https://en.wikipedia.org/wiki/Traceability>.

² International Sustainability & Carbon Certification, *ISCC 203: Traceability And Chain Of Custody Version 3* (Cologne: ISCC System GmbH, 2016), accessed March 22, 2018, https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2017/02/ISCC_203_Traceability_and_Chain-of-Custody_3.o.pdf.

³ *Ibid.*

⁴ Roundtable on Sustainable Palm Oil, *RSPO Supply Chain Certification Standard* (Kuala Lumpur: Roundtable on Sustainable Palm Oil, 2017), accessed March 20, 2018, <https://rspo.org/key-documents/certification/rspo-supply-chain-certification>.

dipertanggungjawabkan atau menjamin bahwa tidak ada produk yang bukan dari sumber yang sustainable diklaim sebagai produk sustainable⁵

Itu adalah definisi traceability secara khusus dalam dunia sertifikasi komoditas berkelanjutan. Akan tetapi, traceability memiliki makna yang lebih umum. Dengan tren belakangan ini, khususnya untuk komoditas minyak sawit, ada penerapan traceability dalam konteks-konteks lain. Dasar pemahamannya sama, yaitu bahwa produk bisa dilacak hingga ke asalnya, tapi penggunaannya dilakukan dalam konteks berbeda.

Salah satu penerapan traceability di komoditi minyak sawit adalah untuk pengelolaan resiko bagi sebuah perusahaan. Perspektif yang digunakan adalah perspektif sebuah perusahaan yang membeli minyak sawit dari sumber yang berbeda-beda dan ingin agar seluruh minyak sawit yang dibelinya dapat dilacak asal produksinya, hingga ke pabrik kelapa sawit (PKS) atau bahkan hingga ke asal perkebunannya. Misalnya Palm Oil Traceability Working Group, yaitu sebuah kelompok pemain-pemain besar dalam industri sawit yang menginginkan adanya traceability dalam rantai pasok mereka, mendefinisikan traceability sebagai "mengetahui seluruh sumber sawit di dalam rantai pasok sebuah perusahaan hingga ke perkebunan (termasuk petani), dan keterlackan hingga ke pabrik adalah sebagai langkah menengah dalam mencapai keterlackan sepenuhnya"⁶. Tujuan utama dari melakukan traceability ini adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber minyak sawit yang beresiko tinggi melakukan praktik yang tidak sustainable, agar dapat dilakukan intervensi dalam berbagai bentuk untuk mencoba mengubah praktik tersebut⁷. Tentu saja, perusahaan memiliki motivasi ekonomi untuk menerapkan traceability. Perusahaan-perusahaan ini memiliki penjualan yang besar di masyarakat konsumen yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan yang tinggi seperti di Eropa Barat dan traceability dapat menjamin keamanan rantai pasok mereka dari sumber-sumber yang tidak ideal⁸.

Saat ini masing-masing perusahaan besar yang merupakan pembeli minyak sawit maupun perusahaan produsen sawit memiliki komitmen dan metodenya sendiri untuk melakukan traceability. Unilever, Cargill, Wilmar, Golden Agri, Neste Oil, Johnson & Johnson, Ferrero, Pepsi adalah nama-nama yang muncul dalam pencarian di internet untuk 'palm oil traceability', dan di dalam website masing-masing perusahaan terdapat penjelasan mengenai komitmen dan cara mereka dalam melakukan traceability. Lalu untuk melakukan analisis resiko terhadap sumber-sumber yang telah berhasil dilacak tersebut sekarang terdapat alat-alat analisis geospasial berbasis web yang antara lain

⁵ International Sustainability & Carbon Certification, *ISCC 203: Traceability And Chain Of Custody Version 3* (Cologne: ISCC System GmbH, 2016), accessed March 22, 2018, https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2017/02/ISCC_203_Traceability_and_Chain-of-Custody_3.0.pdf.

⁶ Palm Oil Traceability Working Group, *Achieving Traceability In Palm Oil: Palm Oil Traceability Working Group (TWG) Concept Note* (Palm Oil Traceability Working Group, n.d.), accessed March 20, 2018, <https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2016/07/TWG-concept-note.pdf>.

⁷ Ibid.

⁸ ManMohan Sodhi, "Palm Oil: Is It Practical To Aim For Total Traceability", *The Guardian*, 2014, accessed March 20, 2018, <https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/palm-oil-unilever-traceability-practical>.

dikembangkan oleh World Resource Institute (WRI) dengan alat PALM Risk Tool, Global Canopy dengan alat TRASE, atau GRAS yang dikembangkan khusus untuk mengacu pada persyaratan European Union-Renewable Energy Directive

Persoalan traceability juga menemukan tantangan ketika mulai berbicara soal petani, terutama petani swadaya. Keterlacakan pada rantai pasokan tandan buah segar dari petani swadaya adalah tantangan tersendiri dengan banyaknya pihak penengah yang ada di antara petani dengan pabrik kelapa sawit yang dipasoknya. Maka dari itu mulai ada alat-alat pemetaan geospasial yang juga dikembangkan untuk mengumpulkan data survey rantai pasokan dari petani hingga PKS yang digabungkan dengan kemampuan untuk pemetaan lahan petani agar dapat dianalisa. Alat-alat ini antara lain yang dikembangkan oleh Ditjenbun dan INOBU bernama SIPKEBUN, SETARA Jambi yang bernama JALASETARA dan Geotraceability dengan GeoT.

Seperti dapat dilihat di atas, konsep traceability dalam aplikasinya di dunia minyak sawit berkelanjutan cukup kompleks dan maksud dari tulisan ini adalah untuk menjelaskan berbagai macam aplikasi yang berbeda tersebut. Di bagian berikut, tulisan ini akan memulai dengan menjelaskan lebih jauh konsep traceability sebagaimana digunakan dalam sertifikasi sustainability yang berkaitan dengan Chain-of-Custody. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan penjelasan terhadap penerapan traceability dalam konteks pengelolaan resiko rantai pasok oleh perusahaan-perusahaan besar pembeli minyak sawit. Terakhir akan dibahas mengenai penerapan traceability terhadap rantai pasokan petani swadaya.

2 Traceability dalam Konteks Sertifikasi

Bagian ini akan menjelaskan mengenai konsep traceability sebagaimana diterapkan dalam konteks sertifikasi berkelanjutan. Penerapan traceability di dalam konteks ini dimaksudkan untuk menjaga integritas dari klaim mengenai nilai sustainability dari sebuah material, atau untuk menjamin bahwa klaim sustainability yang ada pada produk yang berada di tangan konsumen dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, proses produksi harus memiliki prosedur keterlacakan yang disesuaikan dengan model rantai pasok sertifikasi yang dipilih. Cara untuk menjamin keterlacakan ini adalah pencatatan secara konsisten di sepanjang rantai pasok, tentang dari mana dan ke mana sebuah produk atau bahan baku berjalan. Kegiatan pencatatan ini disebut sebagai chain of custody (CoC).

Berikut akan dibahas mengenai apa saja model-model rantai pasok sertifikasi sustainability yang tersedia dan apa saja prinsip-prinsip utama dari CoC dengan mengacu pada 3 sertifikasi sustainability yang saat ini berlaku terhadap komoditas minyak sawit yaitu the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) dan Sustainable Agriculture Network (SAN) yang diterapkan oleh Rainforest Alliance (RA).

2.1 Pilihan-Pilihan Model Rantai Pasok

Untuk melakukan jual beli minyak sawit bersertifikat di sepanjang rantai pasok, skema-skema sertifikasi yang ada menawarkan beberapa pilihan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk awal pengembangan model rantai pasok RSPO, ada 5 pilihan model rantai pasok yang diusulkan berdasarkan model-model ini digunakan dalam berbagai jenis sertifikasi komoditas yang memasuki Eropa⁹. RSPO memilih 4 diantaranya, demikian juga ISCC tampaknya mengadopsi keempat model yang digunakan RSPO. Akan tetapi tulisan ini akan membahas kelima pilihan tersebut sebab SAN masih menggunakan satu model yang tidak dipilih oleh RSPO yaitu percentage-based claim. Namun penting diingat bahwa standar SAN berlaku untuk seluruh komoditas pertanian bukan hanya minyak sawit.

Model-model rantai pasok tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu model rantai pasok yang klaim atau nilai sertifikasinya dijual melekat pada produk dan model rantai pasok yang klaim atau nilai sertifikasinya dijual tidak melekat pada produk. Model rantai pasok yang nilai sertifikasinya melekat pada produk umumnya dianggap memiliki nilai kepercayaan yang lebih tinggi di mata konsumen karena produk dengan klaim sertifikasi yang berada di tangan konsumen benar-benar dibuat dengan bahan yang berasal dari perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan. Sedangkan, untuk model sertifikasi yang klaim atau nilai sertifikasinya dijual tidak melekat kepada produk, produk mungkin dibuat dengan bahan yang mungkin tercampur atau tertukar dengan bahan non-sertifikasi saat

⁹ Proforest, *Discussion Paper 1: A Background Review Of Supply Chain Traceability Options*, Developing a mechanism for palm oil traceability from plantation to end user (Oxford: Proforest, 2005), accessed March 22, 2018, <https://www.proforest.net/en/publications/publications-pdfs/developing-a-mechanism-for-palm-oil-traceability-from-plantation-to-end-user-a-background-review-of-supply-chain-traceability-options>.

proses produksi. Dalam kasus model sertifikasi Book and Claim apalagi, bahan yang digunakan dalam produk adalah bahan biasa, sementara nilai sertifikasinya ditempelkan di produk melalui sebuah surat yang dibeli. Namun prosedur CoC untuk model rantai pasok yang klaimnya melekat pada produk akan jauh lebih rumit dan mahal untuk dilakukan karena produk bersertifikasi akan harus dipisahkan dan diidentifikasi di sepanjang proses produksi. Sedangkan pada model sertifikasi yang klaimnya tidak melekat pada produk, proses produksi tidak perlu pemisahan terus-menerus, yang penting ada pencatatan terhadap kuantitas yang dibeli dan dijual.

Selain itu, untuk model sertifikasi yang klaimnya tidak melekat pada produk, serta model sertifikasi dengan skema yang memperbolehkan bahan bersertifikasi memiliki komposisi di bawah 100% pada sebuah produk (Percentage-Based Claim) dengan sisanya ditutup menggunakan bahan non-sertifikasi, ada persoalan tentang bahan non-sertifikasi yang digunakan. Produk yang memiliki klaim sustainability namun dibuat dengan bahan non-sertifikasi yang mungkin saja berasal dari perkebunan yang bukan saja tidak dikelola secara berkelanjutan, bahkan bisa jadi melanggar prinsip-prinsip kepatuhan perijinan (ilegal) atau menyebabkan konflik yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Tentu saja ini adalah sesuatu yang sulit untuk diterima¹⁰. RSPO (dan juga Forest Stewardship Council atau FSC, misalnya) hanya memperbolehkan klaim "mendukung produksi yang berkelanjutan" pada model rantai pasok yang klaimnya tidak melekat pada produk dan bukan klaim "berasal dari perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan" seperti pada model rantai pasok yang melekat pada produk.

Berikut akan dijelaskan mengenai 5 model sertifikasi yang berbeda tersebut.

2.1.1 Model dengan klaim atau nilai sertifikasi yang dijual melekat pada produk

2.1.1.1 Segregasi

Model ini mengharuskan seluruh minyak sawit yang diproduksi dari perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan, tidak dicampurkan dengan minyak sawit yang diproduksi tidak secara berkelanjutan. Artinya sebuah pabrik refinery misalnya, dapat menerima CPO dari beberapa PKS berbeda yang memiliki sertifikasi berkelanjutan, dan dalam produksi mencampur minyak-minyak tersebut. Akan tetapi jika pabrik refinery tersebut juga menerima minyak sawit dari PKS yang tidak memiliki sertifikasi, maka minyak tidak bersertifikasi tersebut tidak boleh tercampur dengan minyak bersertifikasi. Anggap saja seperti minyak bersertifikat dengan tidak bersertifikat memiliki "grading" yang berbeda sehingga tidak boleh tercampur.

2.1.1.2 Identity Preserved

Model ini selangkah lebih jauh daripada model segregasi karena minyak sawit harus dapat diidentifikasi asal-usul perkebunannya, dengan demikian setiap minyak sawit yang berasal dari perkebunan yang berbeda harus terpisah dan teridentifikasi di sepanjang proses

¹⁰ FSC sampai membuat aturan khusus terhadap bahan baku yang bukan bersertifikat yang mau digunakan untuk dicampur dengan bahan bersertifikat yaitu aturan Controlled Wood, semacam persyaratan minimal agar bahan baku kayu tidak illegal, berasal dari area konflik dan lain sebagainya.

produksi. CPO yang dari PKS A tidak dapat tercampur dengan CPO yang berasal dari PKS B dan seterusnya. Dapat dibayangkan betapa rumit dan mahal nya metode pelacakan yang harus diterapkan di sepanjang produksi untuk mencapai hal tersebut. Produk yang dipegang oleh konsumen akhir harus dapat diidentifikasi kembali sebagai produk yang dibuat dari minyak sawit yang diproduksi di PKS A, atau bahkan di estate perkebunan A.

2.1.1.3 *Percentage Based Claim*

Model ini memperbolehkan pencampuran antara bahan bersertifikat dengan non-sertifikat, selama proporsi antara keduanya dalam bentuk persentase terus tercatat sepanjang rantai produksi. Dengan demikian produk akhir dapat diklaim sebagai "mengandung xx% bahan yang diproduksi dari perkebunan yang berkelanjutan". RSPO dan ISCC memilih untuk tidak menggunakan model ini, sedangkan Rainforest Alliance masih memperbolehkan model ini. Produsen dapat menggunakan label sertifikasi yang ditempelkan pada keseluruhan produk dengan mencantumkan persentase, dalam kasus RA hingga paling sedikit 30%¹¹. Cara ini tidak begitu disukai karena dianggap dapat mengurangi permintaan terhadap sustainable palm oil dan dengan demikian mengurangi insentif bagi produser di hulu untuk memproduksi sustainable palm oil.

2.1.2 **Model dengan klaim atau nilai yang dijual terpisah dari produk**

2.1.2.1 *Mass Balance*

Model ini juga bisa disebut sebagai "volume masuk, volume keluar", karena model ini bergantung pada mekanisme pencatatan volume minyak sawit bersertifikat yang masuk dengan volume minyak sawit bersertifikat yang keluar. Model ini memperbolehkan minyak sawit bersertifikat tercampur atau tertukar dengan minyak tidak bersertifikat selama produksi (tidak perlu pemisahan) asalkan kuantitas dari volume yang masuk dengan yang volume yang keluar dan diklaim sebagai bersertifikat harus dapat direkonsiliasi. Misalkan, sebuah pabrik membeli 1.000 ton minyak sawit bersertifikat dan 2.000 ton minyak yang tidak bersertifikat dan dalam produksinya tercampur atau tidak dibedakan, maka misalkan total keluaran produksinya sejumlah 3.000 ton (kalau tidak memperhitungkan faktor konversi), maka dari 3.000 ton tersebut hanya 1.000 ton yang dapat diklaim sebagai minyak bersertifikat. Akan tetapi tidak dapat dibuat hubungan antara 1.000 ton produk yang diklaim sebagai bersertifikat tersebut dengan 1.000 ton bahan baku bersertifikat yang dibeli di awal tadi. Produk 1.000 ton yang bersertifikat itu bisa saja berasal dari bahan baku 1.000 ton yang bersertifikat, bahan baku 2.000 ton yang tidak bersertifikat, atau campuran keduanya.

2.1.2.2 *Book and Claim*

Dalam model ini, nilai sertifikasi dijual dalam bentuk sertifikat, sama sekali terpisah dari fisik produknya sendiri. Dengan demikian tidak diperlukan sistem keterlacakan di dalam rantai pasok, akan tetapi sertifikat akan menghubungkan secara langsung antara nilai

¹¹ Rainforest Alliance, *Rainforest Alliance Chain Of Custody Standard Version 3* (New York: Rainforest Alliance, 2015), accessed March 22, 2018, <https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/resource-item/chain-of-custody-standard/>.

praktik sustainability di perkebunan dengan produk akhir. Pabrik kelapa sawit yang menerima dan memroses buah yang berasal dari perkebunan yang memiliki sertifikat berkelanjutan, dapat menjual nilai sustainability yang dimiliki produknya dalam bentuk sertifikat secara langsung kepada produsen di hilir, sedangkan minyaknya secara fisik dijual sebagai minyak sawit biasa non-sertifikat. Petani kelapa sawit pun dapat melakukan ini terhadap buahnya yang diproduksi secara sustainable. Sementara produsen di hilir membeli sertifikat sejumlah yang diinginkan agar dapat meletakkan label sustainability pada produknya, sementara produknya dapat dibuat menggunakan bahan baku non-sertifikat biasa.

Setelah memahami model-model rantai pasok yang berbeda, sekarang akan dibahas mengenai persyaratan-persyaratan yang umumnya ada di dalam standar CoC.

2.2 Prinsip-Prinsip Umum dalam Standar CoC

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, standar CoC bertujuan untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen yang memungkinkan pencatatan yang konsisten terhadap informasi-informasi yang penting untuk menjaga ketelusuran atau keterlacakan produk. Standar CoC diberlakukan terhadap setiap perusahaan yang secara hukum memiliki produk dan yang secara fisik menangani produk. Syarat-syarat CoC yang berlaku dalam skema-skema sertifikasi yang berbeda dapat ditarik persamaannya ke dalam beberapa prinsip umum yang akan diidentifikasi dalam tulisan ini. Standar yang dipelajari untuk kepentingan tulisan ini adalah Rainforest Alliance Chain of Custody Standard, July 2015¹² dan ISCC 203 Traceability and Chain of Custody Version 3.0¹³ serta RSPO Supply Chain Certification Standard Revised 14 June 2017¹⁴. Ketiga standar ini dipilih karena standar-standar ini telah diterapkan untuk komoditi sawit. Metode yang digunakan oleh RA dan ISCC adalah metode pencatatan yang konvensional sedangkan RSPO telah menggunakan metode pencatatan yang terintegrasi dengan menggunakan landasan IT.

Terdapat 5 prinsip penting dari sistem CoC yaitu:

2.2.1 Sistem manajemen

Untuk menjalankan sistem CoC secara konsisten di dalam perusahaan, maka perusahaan harus memiliki sistem manajemen yang disiapkan untuk mengakomodasi sistem tersebut. Persyaratan umum yang biasanya ada dalam standar terkait sistem manajemen adalah adanya Standard Operational Procedure (SOP) untuk menangani keterlacakan produk bersertifikat yang ditangani oleh perusahaan di sepanjang proses yang dijalani di dalam perusahaan tersebut. Setiap standar menyaratkan hal-hal yang harus ada dalam SOP ini. Secara umum, standar akan meminta bahwa SOP menjelaskan penanganan dan proses apa

¹² Ibid.

¹³ International Sustainability & Carbon Certification, *ISCC 203: Traceability and Chain Of Custody Version 3* (Cologne: ISCC System GmbH, 2016), accessed March 22, 2018, https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2017/02/ISCC_203_Traceability_and_Chain-of-Custody_3.0.pdf.

¹⁴ Roundtable on Sustainable Palm Oil, *RSPO Supply Chain Certification Standard* (Kuala Lumpur: Roundtable on Sustainable Palm Oil, 2017), accessed March 20, 2018, <https://rspo.org/key-documents/certification/rspo-supply-chain-certification>.

saja yang akan terjadi di dalam perusahaan tersebut terhadap produk bersertifikat, dengan memasukan penggambaran flowchart, serta bagaimana prosedur perusahaan menangani produk tersebut dalam setiap perpindahan yang diperlukan dalam proses untuk menjamin keterlacakannya.

Standar juga menyaratkan adanya struktur personel yang dapat bertanggung jawab terhadap penerapan prosedur tersebut. Biasanya ada satu orang dianggap bertanggung jawab atas keseluruhan proses, dengan anak-anak buah yang mungkin diberi tanggung jawab untuk bagian-bagian proses tertentu. Manajemen dan personel yang terlibat dalam penanganan produk bersertifikat juga harus memahami prosedur dan terlatih, sehingga pelatihan juga menjadi persyaratan kunci di dalam standar CoC.

Persyaratan lain yang juga ada adalah internal audit, yaitu bagaimana manajemen memastikan kepatuhan dengan prosedur yang disyaratkan minimal dilakukan setahun sekali. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka manajemen harus membuat sebuah corrective action plan. Persyaratan CoC juga berlaku pada subkontraktor yang digunakan oleh perusahaan, jika perusahaan meng-*outsources* sebagian pekerjaan yang diperlukan dalam menangani produk. Standar biasanya menyaratkan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan subkontraktor ini dan memastikan bahwa prosedur CoC tetap berlaku saat produk ditangani oleh subkontraktor.

2.2.2 Pengendalian terhadap sumber produk

Penting untuk memastikan bahwa produk yang dibeli adalah benar-benar merupakan produk bersertifikat serta memastikan kaitan dengan perusahaan yang mengasuh produk tersebut sebelumnya tidak terputus. Sehingga prosedur CoC menyaratkan agar perusahaan memeriksa dengan seksama bukti-bukti dokumen yang menemani produk untuk menjamin bahwa produk yang dibeli atau dijual adalah produk yang bersertifikat, misalnya dengan memeriksa keabsahan sertifikat yang dimiliki supplier serta adanya klaim sertifikasi dan kuantitas produk bersertifikasi di dalam dokumen jual beli (*invoice*) serta pengiriman. Informasi tentang pemasok seperti nama, alamat, nomor sertifikasi dan sebagainya juga harus lengkap di dalam dokumentasi ini. Untuk produk bersertifikasi RSPO, pendokumentasian informasi ini dilakukan dalam sebuah alat berbasis web yang diberi nama Palm Trace yang dapat diakses oleh para pemegang sertifikasi untuk saling berbagi informasi¹⁵.

2.2.3 Pengendalian dalam proses produksi

Dalam proses produksi di dalam perusahaan, harus ada pengendalian yang cukup untuk setidaknya memastikan bahwa jumlah material yang masuk dengan produk yang dijual dapat dicocokkan dan juga memperhitungkan faktor konversi yang terjadi saat produksi. Dalam model-model rantai pasok tertentu, bahkan produk bersertifikat tidak dapat dicampur dengan produk yang tidak bersertifikat dan harus dapat diidentifikasi sepanjang waktu.

¹⁵ "Palmtrace", *Rspo.Org*, accessed March 20, 2018, <https://rspo.org/palmtrace>.

2.2.4 Pengendalian dalam penjualan dan pengiriman

Seperti saat membeli, menjual produk bersertifikat pun harus memiliki prosedur untuk memastikan bahwa produk yang dijual benar-benar produk bersertifikat dan informasi yang menunjukkan identitas perusahaan ada di dalam dokumen penjualan dan pengiriman untuk menjamin ketersediaan kaitan atas rantai hak asuh terhadap produk tersebut. Sama dengan saat pembelian, untuk produk sertifikasi RSPO, pencatatan penjualan dan pengiriman harus dimasukkan ke dalam Palm Trace¹⁶.

2.2.5 Pengendalian dalam pemberian label dan klaim

Pabrik yang membuat produk akhir yang menggunakan bahan baku bersertifikat yang dijual kepada konsumen menggunakan label atau trademark pada produknya untuk menginformasikan kepada konsumen mengenai nilai sustainability dari produknya sesuai dengan model rantai pasok yang dipilih. Dengan demikian label ini memberikan sebuah informasi kepada konsumen untuk menjadi bahan pertimbangan saat mereka memilih produk untuk dibeli. Tentunya, penjual berharap bahwa dengan adanya informasi tersebut, konsumen akan memilih produknya. Setiap skema sertifikasi akan mengatur penggunaan label dan klaim sesuai dengan kebijakan organisasi pemilik standar tersebut untuk menjamin integritas label sertifikasi. Hal-hal yang diatur biasanya terkait dengan klaim sertifikasi yang boleh digunakan sesuai dengan pilihan model rantai pasok maupun hal-hal terkait desain label yang biasanya disediakan oleh organisasi yang membuat skema sertifikasi. Aturan penggunaan label ini bersama dengan syarat-syarat CoC yang sudah dibahas di atas menjamin ketepatan informasi yang sampai ke tangan konsumen yang akan memilih produk yang akan dibelinya.

Setelah pembahasan mengenai penerapan traceability dalam konteks penanganan produk bersertifikat sustainability, berikut akan dibahas mengenai penerapan traceability dalam konteks pengelolaan resiko bagi perusahaan-perusahaan yang membeli minyak sawit dari berbagai sumber.

¹⁶ Ibid.

3 Traceability dalam Konteks Pengelolaan Resiko

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai penerapan konsep traceability dalam konteks penanganan produk bersertifikasi. Penjelasan tersebut sedikit banyak telah memberikan gambaran tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk dapat mencapai traceability. Produk bersertifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan klaimnya adalah suatu hal yang amat penting bagi kepercayaan konsumen. Tentu saja produk bersertifikat adalah jaminan untuk sumber bahan baku yang selain terlacak juga sustainable. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan masih mendapatkan sumber bahan baku yang bukan dari perkebunan dengan sertifikasi sustainability. Dengan demikian, perusahaan masih memiliki sumber-sumber bahan baku yang bisa dibilang tidak jelas asal-usulnya serta tidak jelas produksinya seperti apa dan hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap citra dan merk mereka secara keseluruhan. Penggunaan produk bersertifikat tidak akan ada banyak manfaatnya jika perusahaan tersebut masih menggunakan bahan baku yang dianggap tidak jelas, bahkan penggunaan produk bersertifikat dapat beresiko menimbulkan tuduhan greenwashing terhadap mereka. Dengan demikian, banyak perusahaan mulai membuat dan menerapkan komitmen untuk menerapkan traceability ke dalam seluruh sumber bahan baku produk mereka.

3.1 Komitmen Traceability Perusahaan

Persyaratan traceability yang diterapkan dalam konteks ini tidaklah serumit traceability dalam konteks chain of custody produk bersertifikat. Dalam hal ini tujuan yang dicapai bukanlah mengidentifikasi dan memisahkan produk, namun untuk mengetahui darimana saja bahan baku berasal. Pencatatan dilakukan untuk melacak asal-usul bahan baku, namun tidak diperlukan identifikasi atau pemisahan produk itu sendiri di dalam proses produksi. Biasanya perusahaan akan menetapkan target untuk mencapai 100% bahan baku terlacak di tahun tertentu. Sebelum target tersebut tercapai, perusahaan akan mengklaim bahwa sekian persen asal-usul bahan baku dapat terlacak. Untuk mencapai keterlacakan ini, diperlukan kesepakatan dengan pemasok mereka untuk melakukan pencatatan asal-usul bahan baku yang dijual. Informasi yang disyaratkan untuk dicatat biasanya termasuk nama PKS, titik koordinat lokasi, nama parent company, dan volume bahan baku yang dipasok.

Untuk lebih memahami bagaimana persyaratan traceability dalam konteks ini, berikut akan dijelaskan dengan menggunakan contoh kebijakan traceability dari PepsiCo sebagai produsen hilir dan Wilmar sebagai produsen di hulu.

3.1.1 Contoh Kebijakan Traceability PepsiCo

Sistem traceability yang digunakan oleh PepsiCo dapat mengilustrasikan bagaimana sebuah perusahaan di hilir dapat menerapkan traceability terhadap seluruh bahan baku minyak sawit mereka. Penjelasan ini dapat dibaca dalam dokumen "Palm Oil Traceability

Protocol” mereka yang dapat diunduh dari internet¹⁷. Definisi traceability yang mereka gunakan mengacu pada definisi yang diformulasikan oleh Traceability Working Group yaitu “mengetahui seluruh sumber minyak sawit di dalam rantai pasok sebuah perusahaan hingga ke level perkebunan (termasuk petani) dan keterlacakan hingga ke pabrik kelapa sawit adalah langkah menengah untuk mencapai keterlacakan penuh”. PepsiCo menargetkan untuk mencapai keterlacakan hingga level PKS di tahun 2016. Mereka tidak menetapkan metode seperti apa yang harus digunakan, namun menyerahkan pemilihan metode kepada pemasok mereka namun menetapkan minimum data yang harus dilacak.

PepsiCo mendaftarkan ada 10 tingkatan rantai pasok diantara mereka sebagai end user dengan perkebunan kelapa sawit, dengan kegiatan satu pelaku (perusahaan) dapat mencakup beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut:

Kebun sawit – PKS – Pabrik pelumat PKO – Penyimpanan – Penyulingan Primer – Penyulingan Sekunder – Pedagang Perantara – Produsen Manufaktur – Pemasok Tingkat Pertama – End User.

Tingkatan pelaku di hilir yang tidak berhubungan langsung dengan pabrik CPO atau perkebunan bertugas untuk mengkomunikasikan persyaratan traceability PepsiCo terhadap pemasok mereka yang memiliki hubungan dengan pelaku-pelaku tersebut. Dalam hal ini, pabrik penyulingan primer diidentifikasi sebagai pihak yang memiliki hubungan dan kontrol terhadap pasokan dari PKS dan perkebunan dengan demikian mereka diberi tugas sebagai “First Aggregator” yaitu pengumpul data PKS-PKS yang memasok kepada mereka. Data ini harus mereka serahkan kepada pelaku berikut di rantai pasok mereka, untuk akhirnya sampai kepada PepsiCo.

Selain data PKS-PKS yang memasok minyak sawit kepada mereka, setiap pelaku di rantai pasok harus menghitung jumlah persentase minyak sawit mereka yang traceable untuk dilaporkan kepada pelaku berikut untuk akhirnya disampaikan kepada PepsiCo, dan dengan demikian PepsiCo dapat mengumpulkan semua data tersebut dan menghitung berapa total persentase minyak sawit mereka yang traceable.

Dengan system tersebut, terlihat bahwa PepsiCo bergantung pada pemasok-pemasok mereka mengenai data. Untuk mengontrol hal ini, PepsiCo melakukan skoring resiko terhadap pemasok-pemasok mereka berdasarkan tingkat kompleksitas rantai pasok, transparansi dan sistem uji tekun yang mereka terapkan. Untuk pemasok yang beresiko tinggi, PepsiCo akan menugaskan pihak ketiga untuk melakukan audit verifikasi dengan sistem sampling terhadap pemasok-pemasok ini.

¹⁷ PepsiCo, *Palm Oil Traceability Protocol* (PepsiCo, 2015), accessed March 22, 2018, <https://www.pepsico.com/docs/album/policies-doc/pepsico-palm-oil-traceability-protocol.pdf?sfvrsn=2>.

3.1.2 Contoh Kebijakan Traceability Wilmar International

Kebijakan traceability Wilmar dapat dilihat di websitenya. Terdapat dua jenis traceability di Wilmar yaitu traceability ke PKS¹⁸ dan traceability ke perkebunan¹⁹. Wilmar menyatakan bahwa melakukan traceability ke perkebunan tidak menjadi prioritas saat ini karena traceability ke PKS kurang lebih dianggap cukup sebagai indikator tentang lokasi geografis pasokan tandan buah segarnya. Untuk traceability ke perkebunan, Wilmar sendiri menyatakan bahwa seluruh PKS mereka masih memiliki 0% tandan buah segar yang traceable ke asalnya, kecuali untuk PKS yang dimiliki oleh Wilmar sendiri dan beberapa PKS yang tersertifikasi RSPO. Meskipun begitu mereka sudah mulai mendefinisikan data-data apa saja yang harus dikumpulkan untuk traceability perkebunan seperti nama perusahaan induk, nama estate, lokasi GPS, jumlah pekebun (untuk petani), area tertanam, status sertifikasi serta persentase TBS yang masuk dari sumber tersebut.

Untuk traceability ke PKS, Wilmar mengidentifikasi persentase minyak sawit yang traceable, jumlah PKS yang memasok, nama dan status sertifikasinya. Data yang disyaratkan untuk dianggap traceable adalah nama perusahaan induk, nama PKS, alamat, titik koordinat dan volume. Seluruh informasi ini harus ada untuk minyak sawit yang dipasoknya dianggap traceable. Wilmar mencatat minyak yang traceable dalam bentuk volumetrik, yaitu persentase produk yang datang dari PKS yang traceable dan numerik yaitu persentase jumlah PKS-PKS yang traceable dari seluruh PKS-PKS yang memasok ke Wilmar.

3.2 Analisis Resiko Sustainability

Tentu saja traceability ini bukanlah tujuan akhir baik bagi Wilmar maupun PepsiCo dan juga perusahaan-perusahaan lain yang melakukan traceability. Data traceability ini menjadi sebuah data yang dapat digunakan untuk langkah selanjutnya, yaitu menganalisa resiko yang muncul dari rantai pasok yang sudah diidentifikasi tersebut. Saat lokasi tempat asal minyak sawit sudah diketahui, langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana resiko sustainability yang diasosiasikan dengan tempat asal-usul tersebut. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena banyaknya variabel yang terlibat untuk dapat mengatakan apakah sebuah lokasi memiliki resiko yang tinggi atau tidak. Resiko ini berkaitan dengan indikator-indikator lingkungan seperti deforestasi dan lahan gambut, indikator-indikator sosial seperti konflik atau penggusuran, dan lain sebagainya. Selain variabel yang cukup banyak, informasi yang dapat digunakan untuk mengisi variabel-variabel ini juga terbatas.

Untuk mengisi kebutuhan ini, berbagai pihak sudah mengusahakan sebuah metode dan alat yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menganalisa resiko sustainability sebuah asal-usul produksi bahan baku, sehingga masing-masing perusahaan tidak perlu membuatnya sendiri. Salah satu usaha paling awal adalah yang dilakukan oleh World Resource Institute (WRI), yang juga bekerja sama dengan anggota-anggota Palm Oil

¹⁸ "Traceability Back To Mill", *Wilmar-International.Com*, accessed March 21, 2018, <http://www.wilmar-international.com/sustainability/progress/traceability/traceability-back-to-mill/>.

¹⁹ "Traceability Back To Plantation", *Wilmar-International.Com*, accessed March 21, 2018, <http://www.wilmar-international.com/sustainability/progress/traceability/traceability-back-to-plantation/>.

Traceability Working Group dengan alat data geospasial menggunakan aplikasi web yang dinamakan PALM Risk Assessment Tool²⁰. Belakangan alat-alat serupa seperti TRASE²¹ yang dikembangkan oleh Global Canopy dan Stockholm Environment Institute serta Global Risk Assessment Services (GRAS)²² yang mendasarkan pada kriteria yang dibuat oleh European Commission in the Renewable Energy Directive (EU-RED) yang mencakup data untuk berbagai komoditas seperti daging sapi atau kedelai juga mulai memasukan data untuk komoditas sawit.

Berikut akan dibahas mengenai PALM Risk Tool sebagai contoh. PALM Risk Tool adalah alat yang digunakan oleh pemain-pemain besar yang tergabung di Palm Oil TWG. Selain itu, WRI cukup rajin menuliskan tentang proses pengembangan alat ini sehingga dapat dijadikan sumber rujukan untuk tulisan ini²³.

3.2.1 Contoh Alat Palm Risk Tool

PALM Risk tool menggunakan lokasi PKS sebagai titik awal analisis karena lokasi PKS dianggap cukup untuk menunjukkan lokasi produksi buah sawit juga. Tandan buah segar harus diproses dalam waktu 24 jam maka dari itu lokasi perkebunan yang memasok ke PKS tersebut dianggap tidak dapat lebih jauh dari kira-kira radius 50 km dari PKS. Dengan demikian lokasi PKS dapat digabungkan dengan lapisan data-data geospasial lain yang tersedia untuk menarik kesimpulan tentang resiko sustainability dari produksi sawit. Pada saat ini sudah terdapat data lokasi dari 800 PKS di seluruh dunia.

Dampak yang dianalisa untuk memberikan skoring resiko terhadap sebuah PKS dibagi menjadi dua, yaitu dampak yang mungkin terjadi di masa lalu dan dampak yang berpotensi untuk terjadi di masa depan. Indikator untuk dampak masa lalu yang telah tersedia datanya adalah kehilangan tutupan hutan, kehilangan tutupan hutan di kawasan gambut, hutan primer, kawasan lindung, kawasan berkarbon tinggi dan aktivitas api. Dampak masa lalu penting untuk diketahui agar dapat memahami resiko sehubungan dengan komitmen soal deforestasi untuk reputasi perusahaan. Sedangkan indikator untuk proyeksi di masa depan, yang penting untuk mengetahui daerah yang dapat diprioritaskan untuk diintervensi adalah kawasan bergambut, hutan primer, kawasan lindung, kawasan berkarbon tinggi, tingkat aktivitas api, tingkat kehilangan tutupan hutan.

Saat ini alat ini belum dapat memasukan indikator sosial seperti hak atas tanah atau penggunaan sumber daya, free prior informed consent dan praktik perburuhan. Begitupun juga dengan data-data yang membutuhkan assessment khusus terlebih dahulu seperti high

²⁰ Lyndsey Dowell, Anne Rosenbarger and Sarah Lake, "Palm Oil Mill Data: A Step Towards Transparency", *Wri.Org*, last modified 2015, accessed March 26, 2018, <http://www.wri.org/blog/2015/12/palm-oil-mill-data-step-towards-transparency>.

²¹ "TRASE", *Trase.Earth*, accessed March 26, 2018, <https://trase.earth/about?lang>.

²² "GRAS - Global Risk Assessment Services", *Gras-System.Org*, last modified 2015, accessed March 26, 2018, <https://www.gras-system.org/>.

²³ Sarah Lake, Anne Rosenbarger and Caroline Winchester, *Palm Risk Assessment Methodology: Prioritizing Areas, Landscapes And Mills*, Technical Note (Washington DC: World Resource Institute, 2016), accessed March 20, 2018, https://www.wri.org/sites/default/files/Palm_Risk_Assessment_Methodology_Prioritizing_Areas_Landscapes_And_Mills.pdf.

conservation value area dan high carbon stock area. Data mengenai sertifikasi berkelanjutan seperti RSPO dan juga verifikasi-verifikasi lain yang dilakukan di lapangan sudah masuk ke dalam alat ini sebagai faktor yang memitigasi resiko.

Dengan menggunakan sistem skoring yang dihitung berdasarkan variable-variabel data yang tersedia, pengguna dapat mengidentifikasi sumber-sumber bahan baku mereka yang beresiko tinggi, sehingga harus diprioritaskan untuk diintervensi. Tentu saja akurasi dari sistem penghitungan dan sumber data dapat diperdebatkan namun ini bisa jadi langkah pertama untuk mulai mengidentifikasi kebutuhan untuk intervensi. Seperti yang sudah disebut sebelumnya, alat ini mendasarkan analisisnya pada lokasi PKS. Di bagian berikut akan dibahas mengenai alat traceability di tingkat yang lebih mikro, yaitu rantai pasok petani swadaya.

4 Traceability dalam Konteks Pemetaan Petani

Di dua bab sebelumnya kita sudah membahas tentang penerapan konsep traceability dalam konteks penanganan produk bersertifikat dan penerapan konsep traceability untuk pengelolaan resiko bagi perusahaan. Dari pemaparan tersebut, jelas bahwa pelaku industri di hilir dengan pasar di Eropa Barat dan Amerika Utara sangat memedulikan tentang asal-usul bahan baku produk yang mereka konsumsi. Untuk kasus produk minyak sawit dari Indonesia, sumber bahan baku tandan buah segar sawit cukup besar proporsinya yang berasal dari petani. Untuk buah yang berasal dari petani swadaya, persoalan keterlacakan dapat menjadi masalah yang cukup memusingkan, karena rantai pasok dari petani itu sendiri hingga ke PKS cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak, serta seringkali tidak ada dokumentasinya²⁴. Biasanya ada pengepul yang mengumpulkan buah-buah dari petani, lalu dijual ke agen. Agen-agen ini akan menjual ke pemegang DO yang baru kemudian menjualnya ke PKS. Pengepul dan agen biasanya tidak mendokumentasikan asal buah yang mereka terima, dengan demikian PKS pun tidak akan memiliki data mengenai asal-usul buah petani yang mereka terima.

Bukan hanya persoalan keterlacakan rantai pasok buah petani, namun pengetahuan mengenai lahan petani swadaya dan cara produksi mereka pun sangat terbatas. Petani swadaya membuka lahan dan membudidayakan tanaman secara independen tanpa ada pihak yang mengatur. Terkadang, petani membuka lahan di kawasan yang tidak semestinya digunakan untuk perkebunan, entah karena ketidaktahuan atau ketiadaan pilihan lain. Sulit untuk mengetahui apakah TBS yang masuk ke PKS yang berasal dari produksi petani swadaya berasal dari kebun yang dibuka di lahan yang legal atau tidak.

Berbagai pihak yang telah lama bekerja untuk membantu petani kelapa sawit untuk dapat memproduksi secara sustainable memahami bahwa pemetaan lahan petani dan keterlacakan rantai pasok petani swadaya adalah hal yang penting. Maka dari itu, mereka mulai mengembangkan alat yang dapat membantu untuk memetakan lahan petani dan melacak rantai pasok penjualan buahnya. Beberapa contohnya yaitu SETARA Jambi mengembangkan alat bernama Jala SETARA²⁵, Direktorat Jenderal Perkebunan RI bekerja sama dengan Institut Penelitian Inovasi Bumi mengembangkan SIPKEBUN²⁶, sedangkan Daemeter dengan Geotraceability mengembangkan alat bernama GeoT²⁷.

Alat-alat ini sebetulnya tugasnya adalah menyimpan data hasil survey secara digital, sehingga mudah untuk diintegrasikan, diakses dan diolah. Kita tetap harus melakukan survey

²⁴ Hermawati Widyapratama and Bukti Bagja, "Achieving Palm Oil Traceability In Indonesia'S Complex Supply Chain", *Wri-Indonesia.Org*, last modified 2018, accessed March 22, 2018, <http://www.wri-indonesia.org/en/blog/achieving-palm-oil-traceability-indonesia's-complex-supply-chain>.

²⁵ Rukaiyah Rafiq, "Jala SETARA: An Apps To Trace And Reach Independent Smallholders In Jambi Province", 2016.

²⁶ "Launching SIPKEBUN", *Ditjenbun.Pertanian.Go.Id*, last modified 2016, accessed March 30, 2018, <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-437-launching-sipkebun.html>.

²⁷ "Geotraceability, Daemeter To Support Traceability For Palm Oil Produced By Smallholders", *Daemeter.Org*, last modified 2015, accessed March 30, 2018, <http://daemeter.org/id/news/detail/48#.Wr3PXoxuLIU>.

ke petani, menanyakan informasi yang diperlukan lalu jawaban petani dimasukkan ke dalam sebuah formulir yang bentuknya elektronik dalam handphone android. Selain itu, kita juga dapat melakukan pemetaan yang dilakukan terhadap lahan petani dengan menggunakan GPS juga datanya dapat dimasukkan ke dalam alat ini. Dengan demikian semua hasil survey, datanya sudah terkumpul ke dalam alat dan dapat segera diakses, diolah dan sebagainya, dan juga dapat ditampilkan secara geospasial. Alat ini kemudian juga digunakan untuk melacak rantai pasok penjualan dengan menyimpan data survey pengepul, agen dan pemegang DO. Titik lokasi tempat para intermediary tersebut berada juga disimpan menggunakan GPS sehingga dapat ditampilkan jaringan rantai pasok secara geospasial.

Keuntungan besar dengan adanya data geospasial seperti yang diberikan alat-alat tersebut adalah data dapat dianalisa dengan ditumpukkan dengan data-data spasial lain untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait legalitas kawasan terhadap data lahan petani. Data dapat ditumpukkan misalnya dengan peta kawasan hutan untuk melihat apakah lahan petani berada di kawasan hutan atau di kawasan yang memang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian kita dapat melihat apakah misalnya sebuah PKS menerima buah yang dipanen dari perkebunan yang lokasinya tidak sesuai peruntukkan. Harapannya bukan untuk kemudian mengeluarkan petani-petani tersebut dari rantai pasok, namun untuk melihat petani-petani mana yang butuh pendampingan untuk dibantu.

Meskipun dengan keberadaan alat ini, kegiatan survey dan pemetaan petani adalah masih merupakan pekerjaan yang besar. Pada saat ini kegiatan pemetaan yang dilakukan masih terbatas pada kawasan-kawasan dimana terdapat intervensi oleh pihak ketiga seperti misalnya yang dilakukan oleh SETARA Jambi di Provinsi Jambi atau INOBU di kawasan-kawasan yang melakukan pendekatan yurisdiksi seperti beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah. Masih diperlukan usaha yang cukup besar untuk dapat mendata seluruh petani kelapa sawit di Indonesia.

5 Traceability untuk Mencapai Sustainability

Para pelaku industri minyak sawit internasional menganggap traceability atau keterlacakan rantai pasokan bahan baku sawit mereka sebagai hal yang penting bagi reputasi dan merk perusahaan mereka. Traceability adalah salah satu cara untuk menjamin bahwa bahan baku yang mereka gunakan berasal dari sumber yang sustainable. Tentu saja penggunaan bahan baku bersertifikat yang dapat dilacak sesuai dengan model rantai pasoknya adalah pilihan yang ideal, akan tetapi perusahaan-perusahaan ini tidak dapat mengabaikan rantai pasok mereka yang non-sertifikasi. Dengan demikian mereka harus melacak seluruh sumber-sumber bahan baku mereka termasuk yang berasal dari petani. Maka dari itulah, tersedia berbagai alat yang dapat membantu mereka melakukan pelacakan, khususnya pelacakan pasokan petani dan juga alat-alat yang membantu mereka menganalisa resiko dari rantai-rantai pasokan yang telah teridentifikasi.

Para pelaku yang tergabung dalam Palm Oil Traceability Working Group paham bahwa tujuan utama mereka bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab dengan cara mengeluarkan pemasok-pemasok yang dianggap beresiko tinggi, namun untuk berusaha mendorong perubahan praktik dan melakukan intervensi dimana diperlukan²⁸. Dalam hal ini mereka akan menggunakan kemampuan mereka untuk memberikan insentif maupun disinsentif dan juga mengajak aktor-aktor lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan produksi yang sustainable.

²⁸ Palm Oil Traceability Working Group, *Achieving Traceability In Palm Oil: Palm Oil Traceability Working Group (TWG) Concept Note* (Palm Oil Traceability Working Group, n.d.), accessed March 20, 2018, <https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2016/07/TWG-concept-note.pdf>.

6 Daftar Pustaka

- Dowell, Lyndsey, Anne Rosenbarger, and Sarah Lake. "Palm Oil Mill Data: A Step Towards Transparency". *Wri.Org*. Last modified 2015. Accessed March 26, 2018. <http://www.wri.org/blog/2015/12/palm-oil-mill-data-step-towards-transparency>.
- "Geotraceability, Daemeter To Support Traceability for Palm Oil Produced By Smallholders". *Daemeter.Org*. Last modified 2015. Accessed March 30, 2018. <http://daemeter.org/id/news/detail/48#.Wr3PXoxuLIU>.
- "GRAS - Global Risk Assessment Services". *Gras-System.Org*. Last modified 2015. Accessed March 26, 2018. <https://www.gras-system.org/>.
- International Sustainability & Carbon Certification. *ISCC 203: Traceability and Chain Of Custody Version 3*. Cologne: ISCC System GmbH, 2016. Accessed March 22, 2018. https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2017/02/ISCC_203_Traceability_and_Chain-of-Custody_3.0.pdf.
- Lake, Sarah, Anne Rosenbarger, and Caroline Winchester. *Palm Risk Assessment Methodology: Prioritizing Areas, Landscapes and Mills*. Technical Note. Washington DC: World Resource Institute, 2016. Accessed March 20, 2018. https://www.wri.org/sites/default/files/Palm_Risk_Assessment_Methodology_Prioritizing_Areas_Landscapes_And_Mills.pdf.
- "Launching SIPKEBUN". *Ditjenbun.Pertanian.Go.Id*. Last modified 2016. Accessed March 30, 2018. <http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-437-launching-sipkebun.html>.
- Palm Oil Traceability Working Group. *Achieving Traceability in Palm Oil: Palm Oil Traceability Working Group (TWG) Concept Note*. Palm Oil Traceability Working Group, n.d. Accessed March 20, 2018. <https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2016/07/TWG-concept-note.pdf>.
- "Palmtrace". *Rspo.Org*. Accessed March 20, 2018. <https://rspo.org/palmtrace>.
- PepsiCo. *Palm Oil Traceability Protocol*. PepsiCo, 2015. Accessed March 22, 2018. <https://www.pepsico.com/docs/album/policies-doc/pepsico-palm-oil-traceability-protocol.pdf?sfvrsn=2>.
- Proforest. *Discussion Paper 1: A Background Review of Supply Chain Traceability Options*. Developing a mechanism for palm oil traceability from plantation to end user. Oxford: Proforest, 2005. Accessed March 22, 2018. <https://www.proforest.net/en/publications/publications-pdfs/developing-a-mechanism-for-palm-oil-traceability-from-plantation-to-end-user-a-background-review-of-supply-chain-traceability-options>.
- Rafiq, Rukaiyah. "Jala SETARA: An Apps to Trace and Reach Independent Smallholders in Jambi Province". Presentation, RSPO RT 14 in Bangkok, 2016.
- Rainforest Alliance. *Rainforest Alliance Chain of Custody Standard Version 3*. New York: Rainforest Alliance, 2015. Accessed March 22, 2018. <https://www.rainforest-alliance.org/business/sas/resource-item/chain-of-custody-standard/>.

- Roundtable on Sustainable Palm Oil. *RSPO Supply Chain Certification Standard*. Kuala Lumpur: Roundtable on Sustainable Palm Oil, 2017. Accessed March 20, 2018. <https://rspo.org/key-documents/certification/rspo-supply-chain-certification>.
- Sodhi, ManMohan. "Palm Oil: Is It Practical to Aim for Total Traceability". *The Guardian*, 2014. Accessed March 20, 2018. <https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/palm-oil-unilever-traceability-practical>.
- "Traceability". *En. Wikipedia.Org*. Last modified 2018. Accessed March 24, 2018. <https://en.wikipedia.org/wiki/Traceability>.
- "Traceability Back to Mill". *Wilmar-International.Com*. Accessed March 21, 2018. <http://www.wilmar-international.com/sustainability/progress/traceability/traceability-back-to-mill/>.
- "Traceability Back to Plantation". *Wilmar-International.Com*. Accessed March 21, 2018. <http://www.wilmar-international.com/sustainability/progress/traceability/traceability-back-to-plantation/>.
- "TRASE". *Trase.Earth*. Accessed March 26, 2018. <https://trase.earth/about?lang>.
- Widyapratama, Hermawati, and Bukti Bagja. "Achieving Palm Oil Traceability in Indonesia's Complex Supply Chain". *WRI Indonesia*. Last modified 2018. Accessed March 22, 2018. <http://www.wri-indonesia.org/en/blog/achieving-palm-oil-traceability-indonesia's-complex-supply-chain>.